

**PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN ROKAN HILIR****Achmad Hidir, Nur Laila Meilani, Harapan Tua RFS***hidir09@gmail.com, meilanimeilani09@gmail.com, harapantua@yahoo.co.id*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

**ABSTRACT**

*The maincauses of the gender gap in education is lack of commitment and understanding of gender in Rokan Hilir (Hidir & Yanis, 2015). This study aims to (1) implement / apply the model of community empowerment-based design thinking in order to achieve gender-responsive education in Rokan Hilir; (2) to formulate gender responsive educational design that is contextual in Rokan Hilir. This study uses a qualitative method variant in the form of phenomenology. The unit of analysis is the institutional community of the Department of Education and educators as well as educators in Rokan Hilir. The data collection technique using the techniques of Participatory Rural Appraisal (PRA) with data analysis techniques in the form of a three-lane qualitative data analysis, namely data reduction, data display and conclusion. The results showed that the application of design thinking allows for the application of social change, especially the mindset of the target group in a bottom up. This means that the commitment and understanding of gender responsive education could be increased from the root (grass root) without imposing target groups to change the values of the original locality of the region. Therefore, community empowerment is done to encourage the social changes in a smooth and constructive for local development Rokan Hilir, especially in the field of education and gender.*

**Keywords :** *empowerment, gender, education*

**PENDAHULUAN**

Akar penyebab kesenjangan gender bidang pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir yang mengerucut pada ketiadaan kebijakan yang responsif gender. Hal ini pada gilirannya melemahkan komitmen serta menyimpangkan pemahaman yang tepat tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Struktur sosial budaya turut pula berpengaruh, akan tetapi tidak dapat kemudian dijadikan “kambing hitam” sebab secara filosofis, sebenarnya tidak ada pertentangan antara konsep yang dibawa oleh keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan dengan nilai-nilai sosial budaya setempat. Antara keduanya tidaklah

terdapat paradoks yang harus diperdebatkan.

Oleh karena itu, upaya untuk meminimalisasi kesenjangan gender bidang pendidikan harus diarahkan pada nilai-nilai kearifan lokal dengan menggandeng peranan dari Dinas Pendidikan setempat, sekolah, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat sehingga konsep keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan dapat diimplementasikan dengan cara dan jalan yang *soft* dan “ramah” untuk masyarakat pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Salah satu caranya dengan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai jenis pemberdayaan masyarakat telah jamak dilakukan dan oleh para peneliti dan juga *local enablers*, mulai

dari jenis pemberdayaan yang *profit oriented* hingga tipikal pemberdayaan yang melakukan perubahan *holistik-revolutif* yang pada gilirannya justru menghilangkan originalitas dan jati diri masyarakat yang diberdayakan tersebut. Tipikal pemberdayaan yang demikian secara jangka panjang hanya menimbulkan persoalan baru yang lebih besar yang harus dihadapi oleh masyarakat, misalnya terjadinya degradasi nilai dan moral karena masyarakat telah kehilangan jati diri aslinya.

Pemberdayaan masyarakat (dalam bentuk/ pendekatan apapun) merupakan proses menuju perubahan sosial yang lebih baik yang secara jangka panjang mampu memandirikan masyarakat dalam seluruh aspek, termasuk ekonomi (baca: kesejahteraan). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus tersistem dan terencana dengan memperhatikan kebutuhan serta nilai-nilai kearifan lokal masyarakat itu sendiri sehingga empati serta pemahaman terhadap cara pikir masyarakat menjadi faktor kunci dari upaya pemberdayaan tersebut.

Kajian pemberdayaan masyarakat umumnya diidentikkan dengan aspek kemiskinan sehingga kelompok sasarannya lebih sering dari masyarakat menengah ke bawah dalam hal tingkat kesejahteraan ekonomi (Rinawati, 2009; Alfitri, 2009). Hal ini seringkali menimbulkan kerancuan dalam memahami konsep “berdaya” itu sendiri, yaitu lebih dikaitkan dengan keberdayaan masyarakat atau kelompok dalam segi materi (*financial*) sehingga yang terjadi kemudian adalah pemberdayaan dipandang sebagai upaya transfer sumber daya modal (materi) sebagai perangsang kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sayangnya, perspektif pemberdayaan yang demikian nyatanya hanya menciptakan ketergantungan dari masyarakat terhadap kehadiran para pemberdaya/ fasilitator/ *enablers*. Dalam jangka pendek mungkin akan membawa pada perbaikan, namun

dalam jangka panjang malah menimbulkan banyak persoalan baru yang berpengaruh pada perubahan karakter masyarakatnya (*degradatif*)

Pemahaman terhadap pemberdayaan masyarakat kemudian bergeser pada penekanan kemandirian (jangka menengah dan panjang) dari masyarakat serta tetap terjaganya nilai-nilai dan budaya lokal masyarakat yang hendak diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat idealnya berorientasi pada proses, menggunakan metodologi terkini dan disesuaikan dengan kearifan lokalnya masing-masing (Purnomo, 2015).

*Design Thinking* muncul sebagai metodologi pemberdayaan masyarakat yang kekinian yang di dalamnya hendak memandirikan masyarakat melalui perencanaan yang matang yang berorientasi pada manusia (*human centered design*), bersistem dan tidak memaksakan sudut pandang kepada masyarakat/ kelompok sasaran. *Design Thinking* banyak diaplikasikan dalam proyek-proyek bisnis dan dewasa ini mulai dirancang toolkit berbasis *design thinking* untuk ranah pendidikan (*Design Thinking for Educators*, 2012).

Pentingnya memahami pola pikir (*mindset*) masyarakat dalam rangka menjadikan masyarakat mampu menemukan kebutuhan dan masalah sosialnya untuk kemudian mencari pemecahan masalah tersebut sehingga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bukan merupakan sebuah upaya pemaksaan sudut pandang kepada masyarakat. Kajian tahun pertama telah menemukan bahwa akar permasalahan gender gap bidang pendidikan adalah masih lemahnya komitmen dan pemahaman tentang gender di Kabupaten Rokan Hilir. Komitmen dan pemahaman merupakan hasil dari proses berpikir dan pengalaman yang diyakini kebenarannya dan dijadikan rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain

perwujudan keadilan dan kesetaraan gender khususnya bidang pendidikan telah menjadi sebuah keniscayaan.

Kajian ini mencoba mengaplikasikan salah satu teknik pemberdayaan masyarakat berbasis manusia (*human centered development*) yaitu *Design Thinking*. Bagaimana merangsang terciptanya perubahan sosial yang berdayaguna dan berkelanjutan melalui pendekatan dari segi pola pikir. Oleh pencetusnya, *Design Thinking* diyakini dapat menjadi solusi efektif untuk masalah-masalah sosial, termasuk gender. *Design Thinking* dapat menjadi sarana yang baik dalam rangka menciptakan kondisi sadar gender di bidang pendidikan Rokan Hilir. Selain itu juga diharapkan mampu menjadi bentuk akselerasi perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender bidang pendidikan di Rokan Hilir. Terakhir, sedikit kajian yang mengaplikasikan *Design Thinking* dalam rangka mewujudkan pendidikan responsif gender, sehingga kajian ini menjadi penting untuk dilakukan.

Kajian ini mencoba untuk menggali, memahami serta memecahkan masalah *gender gap* bidang pendidikan di Rokan Hilir dengan mengaplikasikan konsep *Design Thinking*. Ontologinya adalah bagaimana *gender gap* dapat teratasi melalui peta pemikiran ala masyarakat pendidikan itu sendiri sehingga peneliti tidak mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat yang memaksakan sudut pandang; bagaimana mengembangkan empati dalam rangka menumbuhkan inovasi masyarakat sehingga masyarakat pendidikan menjadi sadar gender dan mampu merancang format pendidikan responsif gender di lingkungan sekolah masing-masing. Ke depan, diharapkan dapat menjadi *problem solver* kekinian yang terkait dengan masalah *gender gap*.

### **a. Design Thinking sebagai Alat (Toolkit) untuk Pemberdayaan Masyarakat**

Rappaport mengungkapkan pemberdayaan adalah suatu cara yang dengannya rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya (Suharto, 1997). konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*). Lebih lanjut dalam buku *Modern Social Work Theory*, Payne (1997) menulis bahwa tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.

Pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut. Konsep ini dikembangkan dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari upaya apa yang anatara lain oleh Friedman (1992) dalam Kartasasmita, (1996), disebut "*alternative development*" yang menghendaki "*inclusive democracy*", *appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equality*".

Pemberdayaan masyarakat ditunjukkan oleh memperluasnya jangkauan pilihan terhadap peran yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan perubahan kedudukan yang telah tersedia. Oleh karena itu, pemberdayaan berarti kecakapan atau kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan di dalam dirinya. Dengan demikian, pemberdayaan itu dapat mencakup pemberdayaan psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berkaitan erat satu sama dengan lainnya karena adanya jaringan kerjasama yang saling

memberdayakan, sehingga dapat tercipta transformasi sosial.

Kartasmita (1997) menjelaskan sepuluh mitos yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, mitos tersebut antara lain :

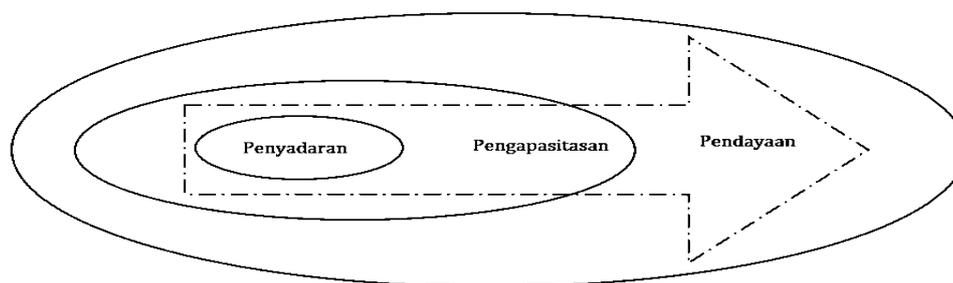
1. Mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih penting dari dimensi moral, dimensi material lebih penting dari pada dimensi institusional, dan dimensi ekonomi lebih penting dari pada dimensi sosialnya.
2. Mitos bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas (*top-down*) lebih mudah dan lebih baik dari pada pembangunan dengan pendekatan dibawah (*bottom-up*) yang berasal dari aspirasi pembangunan ditingkat grass root.
3. Mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material (fisik) dari pada bantuan ketrampilan teknis dan manajerial.
4. Mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor selalu lebih baik dari pada teknologi tradisional.
5. Mitos bahwa kelembagaan lokal (*indegenous institution*) cenderung tidak efisien bahkan tidak efektif serta menghambat proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
6. Mitos bahwa masyarakat dilapis bawa tidak tahu akan apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya.
7. Mitos bahwa berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan, dan kemalasan orang miskin itu sendiri.
8. Mitos bahwa efisiensi adalah tujuan utama pembangunan dan tujuan dari

alokasi sumberdaya-sumberdaya masyarakat.

9. Mitos bahwa sektor pertanian dan pedesaan adalah sektor yang interior, tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa pengembalian investasi yang panjang sehingga tidak perlu untuk diprioritaskan pengembangannya.
10. Mitos keseimbangan dan akses dalam akses dan kepemilikan sumber daya pembangunan merupakan syarat perlu untuk melakukan perubahan.

Tiga kendala utama pemberdayaan masyarakat. Kendala itu adalah (1) kendala yang bersifat fisik alamiah; (2) struktural-kultural; (3) dan sistematik. Kendala fisik-alamiah adalah rintangan-rintangan yang bersifat fisik yang sudah terwarisi pada suatu daerah tertentu, seperti keadaan tanah yang kering, berbukit-bukit dan sulit air. Untuk mengatasi masalah seperti ini sesungguhnya relatif mudah karena yang di butuhkan adalah teknologi, dan itu berarti dana. Akan tetapi pemberian dana atau teknologi pasti tidak akan menyelesaikan segala-galanya, sebab sebelum dan setelah pemberian dana tentu ada persoalan-persoalan yang bersifat nonfisik (social dan kultural) yang tidak sederhana "bentuk" dan cara penyelesaiannya. Persoalan-persoalan semacam itulah yang pasti akan muncul dan dapat dikatakan mempunyai sifat-sifat struktural-kultural.

Sebagai sebuah bentuk perubahan yang terencana, maka pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa pentahapan. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) membagi tahapan pemberdayaan masyarakat dalam tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.



**Gambar 1. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Rinawati (2009) menyebutkan bahwa dalam tahapan penyadaran, masyarakat diberi pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk melakukan perubahan pada dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Tahap selanjutnya adalah proses pengapatisasian atau ering disebut proses “memampukan” (*capacity building*) yang dilakuakn atas tiga hal, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Dalam proses ini, masyarakat diberikan pembelajaran sehingga mereka mempunyai kecakapan, di tingkat organisasi dilakukan restrukturisasi, dan pengapatisasian tingkat sistem nilai dilakukan untuk memberikan aturan main dalam proses pemberdayaan yang dilakukan. Tahap terakhir adalah memberikan “daya” (*empowerment*) itu sendiri. Dalam proses ini masyarakat diberi daya, kekuasaan, dan otoritas.

Glen (1993), Batten (1967) menyebutkan dua tipe pendekatan dalam pengembangan (baca: pemberdayaan) masyarakat, yaitu pendekatan direktif (instruktif) dan nondirektif (partisipatif). Dalam penerapan di lapangan, pemilihan antara pendekatan direktif dan nondirektif perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakatnya. Masyarakat yang sudah mampu mendayagunakan potensi yang dimiliki perlu didekati dengan pendekatan nondirektif, tetapi bagi masyarakat yang relatif belum berkembang (terbelakang) maka pilihan pendekatan lebih diarahkan pada pendekatan direktif. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan nondirektif diindikasikan oleh

kemampuan masyarakat dalam pengorganisasian kegiatan bersama untuk memecahkan permasalahan bersama. Pengorganisasi masyarakat diartikan sebagai pengorganisasian kesadaran, potensi, rencana, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dari kegiatan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Rinawati (2009) merangkum adanya proses lain dalam pemberdayaan masyarakat yang jamak ditemui di lapangan, yaitu :

1. Dimulai dengan masyarakat yang apatis, yaitu mereka menyadari adanya masalah akan tetapi merasa tidak mampu mengatasinya.
2. Menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari pemecahan masalah.
3. Tahap pembebasan, di mana masyarakat mengaktualisasikan dirinya untuk mengambil peran dalam pemecahan masalah.

Nyatanya, berbagai kajian terkait pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa kendala atau faktor kunci (*key factor*) dalam pemberdayaan adalah terkait persepsi masyarakat terhadap masalah yang bersangkutan serta pola pikir masyarakat yang di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai struktural-kultural. Oleh karena itu, Batten (1967) memperkenalkan tahapan proses berpikir untuk mengembangkan aksi kelompok (kelompok yang siap untuk melakukan pengembangan/ pemberdayaan masyarakat).

**Tabel 1. Tahapan Proses Berpikir untuk Mengembangkan Aksi Kelompok**

| Tahap         | Anggota Kelompok   | <i>Community Worker</i><br>(dengan mengajukan pertanyaan)   |
|---------------|--|---|
| Tahap Pertama | Merasa tidak puas tapi masih bersikap pasif  |   |
|               | ↓  | ←   |
| Tahap Kedua   | Menjadi sadar terhadap kebutuhan mereka  | Menstimulasi masyarakat untuk berpikir mengapa mereka merasa tidak puas dan apa yang menyebabkan ketidakpuasan mereka   |
|               | ↓  | ←   |
| Tahap Ketiga  | Menjadi sadar dan ingin melakukan perubahan pada hal-hal tertentu  | Menstimulasi masyarakat untuk berpikir mengenai perubahan apa yang ingin mereka hasilkan untuk memenuhi kebutuhan mereka?   |
|               | ↓  | ←   |
| Tahap Keempat | Memilih apakah setuju atau menentang, dengan usaha-usaha yang akan mereka kembangkan untuk memenuhi keinginan mereka | Menstimulasi masyarakat untuk mempertimbangkan hal-hal apa yang harus mereka lakukan untuk menghasilkan suatu perubahan dengan melakukan aksi (tindakan) sendiri  |
|               | ↓  | ←   |
| Tahap Kelima  | Merencanakan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana melaksanakannya?  | Jika diperlukan, menstimulasi masyarakat untuk mempertimbangkan bagaimana cara yang terbaik untuk mengorganisasi diri mereka sendiri dalam rangka mencapai apa yang mereka inginkan   |
|               | ↓  | ←   |
| Tahap Keenam  | Bertindak sesuai dengan rencana mereka   | Menstimulasi masyarakat untuk mempertimbangkan dan memutuskan rincian apa yang mau dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan kapan serta bagaimana mereka akan mengerjakannya  |
|               | ↓  | ←   |
| Tahap Ketujuh | Puas dengan hasil yang telah mereka capai?   | Menstimulasi masyarakat untuk berpikir kendala atau masalah apa yang belum terlihat yang nantinya dapat memengaruhi kegiatan yang sedang mereka laksanakan ( <i>community worker</i> mungkin tetap diperlukan untuk mendampingi masyarakat untuk kembali mengkaji lima tahapan sebelumnya guna memecahkan permasalahan) |

Sumber : Batten (1967)

Tahapan proses berpikir dari Batten pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tahap perubahan berencana yang dikemukakan oleh Lippit, Watson, dan Westley (1958). Strategi pemberdayaan masyarakat yang sejenis juga dikemukakan oleh Glen (1993). Ketiga-tiganya memfokuskan upaya mengembangkan kemandirian (*self help*), kesempatan warga untuk menentukan pilihannya (*self determination*) dan pendekatan nondirektif. Oleh karenanya, pendekatan yang dikemukakan oleh Lippit dan kawan-kawan serta Batten dan Glen belum menjadi konsep yang kadaluarsa.

Dalam perkembangannya, pendekatan nondirektif yang bertitik tolak pada mindset kelompok sasaran menjadi salah satu ide dan topik kajian yang menghasilkan banyak model dan alat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah model *Design Thinking*.

*Design Thinking* adalah sebuah pola pemikiran dari kaca mata desainer yang dalam memecahkan masalahnya selalu dengan pendekatan *human oriented*. Di beberapa negara, kaidah ini telah dikembangkan dalam berbagai bidang seperti dunia bisnis, pengembangan produk, sosial, budaya, keputusan politik, kebijakan hingga berbagai strategi jangka pendek dan jangka panjang. *Design Thinking* juga diterapkan dalam bidang pendidikan, contoh yang populer adalah *Design Thinking for Educators*.

*Design Thinking* mengolaborasi proses-proses sistematis yang berpusat pada manusia sebagai penggunaannya melalui proses terencana sehingga menghasilkan perubahan perilaku dan kondisi yang sesuai harapan. Terdapat empat pilar dalam *Design Thinking*, yakni pilar keseimbangan, kerangka berpikir, penggunaan alat/*toolkits* dan pola pendekatan (Glinski, 2012). *Design Thinking* pada mulanya hanya diaplikasikan dalam dunia bisnis dan desain/seni. Akan tetapi dalam

perkembangannya, Brown dan Wyatt yang merupakan konseptor *Design Thinking* mengklaim bahwa *Design Thinking* dapat diterapkan untuk pemecahan masalah-masalah sosial.

Sejak pertama kali mulai disebarakan ke seluruh dunia pada tahun 2008 hingga saat ini, *Design Thinking* disadari sebagai suatu metode berpikir baru yang paling responsif dan kompatibel dalam menghadapi dunia modern yang kian terkoneksi dan berubah sangat cepat akibat perkembangan teknologi yang luar biasa.

Penegasan tentang kemampuan *Design Thinking* bekerja melampaui ranah desain hingga ke dalam ranah sosial dijelaskan oleh Tim Brown dan Jocelyn Wyatt (2010) dalam jurnal *Stanford Social Innovation Review* dengan judul *Design Thinking for Social Innovation*. Tim Brown dan Jocelyn Wyatt dalam jurnal ini hendak menunjukkan bahwa sistematika dan metode *Design Thinking* juga dapat digunakan untuk membuat inovasi-inovasi dalam proyek sosial. Brown dan Wyatt kemudian berargumen bahwa *Design Thinking* juga dapat bekerja dengan cara yang sama dalam upaya men-*generate* inovasi bagi perbaikan situasi dan kondisi sosial masyarakat terutama bagi kalangan yang sangat membutuhkan. Menggunakan 3 langkah yang sama: *Inspiration, Ideation dan Implementation* yang sangat ketat, cepat dan sirkular, keduanya memandang 3 langkah ini sebagai *space* atau ruang bergerak luas dalam konteks situasi dan kondisi sosial masyarakat yang lebih luas. Keduanya percaya *Design Thinking* adalah salah satu alat berpikir yang mampu membuat perubahan secara sistemik.

Melalui *the Bill & Melinda Gates Foundation* pada tahun 2008 IDEO bersama-sama IDE, Heifer International dan ICRW mengembangkan *Human Centered Design (HCD) Toolkit: Design Thinking Toolkit for Social Innovation Project 2<sup>nd</sup>.ed*, alat kerja membuat inovasi

dalam proyek sosial-proyek pemberdayaan masyarakat berdasarkan *Design Thinking* yang tanggap dalam implementasi kontesktual dunia sosial.

HCD diterjemahkan sebagai cara mendengar (*hear*) baru mengenai kebutuhan mendasar utamanya masyarakat menengah ke bawah, cara menciptakan (*create*) solusi-solusi yang inovatif dalam tautannya menjawab kebutuhan tadi, dan cara menyampaikan (*deliver*) inovasi-inovasi ini dengan utamanya pertimbangan terhadap keberlanjutan (secara finansial). HCD dimaksudkan sebagai alat yang dapat membantu sebuah organisasi terhubung dengan lebih baik dengan siapa yang dilayaninya, sebagai alat transformasi data menjadi ide-ide yang dapat dilaksanakan, sebagai alat untuk melihat kesempatan-kesempatan baru dan sebagai alat yang dapat membantu kita menjadi lebih efektif dan lebih cepat dalam merumuskan pemecahan masalah. HCD sejak awal memosisikan diri sebagai alat sesuai dengan kepanjangannya *Human Centered Design*; bagi HCD pusat segalanya adalah kita sendiri, manusia sebagai ahlinya dan kita lebih dan yang paling tahu bagaimana menggunakan alat yang hanya berperan sebagai petunjuk (*guidelines*) saat dihadapkan pada konteks permasalahan serta rona dan dimensi sosial yang nyata. Seperti juga dalam pembahasan *Design Thinking*, HCD *toolkit* didasari kepada 3 pertimbangan: *desirability* (apa yang diinginkan serta dimaui oleh masyarakat), *feasibility* (pertimbangan secara teknis dan organisasi yang memungkinkan dalam konteks masyarakat tersebut) dan *viability* (pertimbangan kelayakan finansial).

#### **b. Sekolah Berwawasan Gender Sebagai Cerminan Pendidikan Responsif Gender**

Beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan untuk mewujudkan sekolah

berwawasan gender adalah sebagai berikut (Wibowo, 2010):

1. Adanya pembelajaran responsif gender. Pembelajaran responsif gender adalah proses pembelajaran yang memberikan perhatian seimbang bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan. Pembelajaran responsif gender mengharuskan pendidik untuk memperhatikan berbagai pendekatan belajar yang memenuhi kaidah kesetaraan dan keadilan gender melalui : proses perencanaan pembelajaran; interaksi belajar mengajar; pengelolaan kelas dan; evaluasi hasil belajar. Pembelajaran harus dilakukan responsif gender karena pembelajaran merupakan proses internalisasi nilai tentang baik dan buruk, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan. Karena itu pembelajaran responsif gender harus dilakukan dengan memperhatikan: keadilan akses, partisipasi, kontrol, manfaat; menyadari perbedaan; pendidikan Androgini dan; meninggalkan mitos.
2. Adanya perencanaan pembelajaran responsif gender. Pada pembelajaran responsif gender guru harus memperhatikan berbagai pendekatan belajar yang memenuhi kaidah kesetaraan dan keadilan gender, baik melalui proses perencanaan pembelajaran, interaksi belajar mengajar, pengelolaan kelas, maupun dalam evaluasi hasil belajar. Perencanaan pembelajaran yang responsif gender adalah rencana mengajar yang memperhitungkan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh peserta didik laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran.
3. Adanya penataan ruang kelas yang responsif gender. Tata letak ruang kelas sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Guru yang inovatif perlu tetap mencari cara

untuk mengelola tata letak ruang kelas untuk menjadi lebih kondusif bagi tumbuhnya partisipasi belajar peserta didik laki-laki maupun perempuan. Tata letak ruang kelas perlu memrespon kebutuhan khusus anak perempuan dan anak laki-laki.

4. Adanya manajemen sekolah responsif gender. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama atau setara dalam mengendalikan sistem pendidikan di sekolah misal: kesamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas sekolah. kesempatan ini harus terbuka lebar bagi guru perempuan maupun guru laki-laki. Dasar penentuan seseorang dapat atau tidak dapat mengendalikan sistem pendidikan di sekolah bukanlah jenis kelamin seseorang, tetapi lebih ditentukan oleh kompetensinya;
5. Adanya penggunaan bahasa yang responsif gender. Bahasa juga dapat mendorong terjadinya ketidaksetaraan. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan di kelas seringkali merefleksikan dominasi siswa laki-laki di kelas dan melemahkan perempuan untuk memiliki posisi yang lebih rendah. Guru merefleksikan bias gender yang dimilikinya melalui bahasa yang sesuai kepercayaannya bahwa anak laki-laki tidak sependai atau setekun anak perempuan, anak perempuan tidak seberani anak laki-laki dan sebagainya.
6. Adanya interaksi kelas yang responsif gender. Dalam interaksi di ruang kelas, guru perlu menyadari bahwa siswa laki-laki dan perempuan membutuhkan perhatian yang berlainan. Pembagian peran dan tanggung jawab di kelas sangat berdampak pada proses interaksi mereka di kelas. Guru perlu mengupayakan tidak adanya dominasi salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya. Oleh karena itu

menjadi sangat penting untuk menciptakan interaksi kelas yang benar-benar menggambarkan adanya kesetaraan dan keadilan gender.

## METODE PENELITIAN

### Desain Kajian

Sesuai tema kajian ini adalah hendak melakukan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan pendidikan yang responsif gender. Maka desain kajian ini dirancang menggunakan varian metode kualitatif dalam bentuk fenomenologi. Ini didasari bahwa selama ini masyarakat sebagai sasaran program pembangunan di tempatkan sebagai pihak yang tidak tahu, tidak memiliki pengalaman, tidak memahami permasalahan yang dihadapi, tidak memiliki kemampuan, program diturunkan dari atas ke bawah berupa paket-paket program sehingga masyarakat hanya semata sebagai obyek pembangunan, dan seringkali sebatas sebagai penonton atas pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di sekitarnya.

Paradigma pemberdayaan justru hendak mengubah pola tersebut, karena pembangunan yang telah dilaksanakan berdampak pada ketidakcocokan antara pemrakarsa program dengan masyarakat, akibatnya program pembangunan menjadi tidak berkelanjutan, tidak memperoleh dukungan dari masyarakat bahkan yang terjadi program yang ditinggalkan oleh pemrakarsa pembangunan menjadi salah fungsi, dan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di masyarakat. Atas dasar itulah kajian ini didesain dengan pendekatan kualitatif yang bervariasi pada fenomenologi.

### Lokasi

*Locus* kajian ditentukan secara sengaja (*purposive*) di Kota Bagan Siapi-Api sebagai Ibu Kota Kabupaten Rokan

Hilir. Penetapan lokasi ini didasari karena capaian indeks IPM, IPG, dan IDG yang selalu menempatkan Rokan Hilir pada posisi 3 (tiga) terendah (dalam hal capaian IPG, Kabupaten Rokan Hilir adalah kabupaten dengan angka IPG yang terendah di Provinsi Riau).

### **Fokus dan Unit Analisis Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 (dua) fokus penelitian. *Pertama*, fokus penelitian diarahkan peran Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan berbagai upaya pengembangan dan pemberdayaan dalam konteks pendidikan yang responsif gender. *Kedua*, fokus penelitian ini diarahkan pada pemahaman dan aspirasi masyarakat (tenaga pendidik dan kependidikan) dalam memahami tugas dan fungsinya serta pemahamannya dalam muatan pendidikan yang responsif gender di daerahnya. Unit analisisnya adalah komunitas kelembagaan yang diwakili oleh para individu dari kalangan eksekutif (Dinas Pendidikan) dan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang terkait langsung dengan penentuan arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.

### **Teknik Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan *purposive sampling*. Melalui teknik *purposive sampling* ini dapat diambil informan kunci, kemudian di tambah dan di luas kan menurut informasi subyek pertama dan begitu seterusnya (Salim, 2006). Karena penelitian kualitatif bersifat *naturalistik*, maka besaran jumlah informan tidak bisa ditetapkan sejak awal semuanya sangat tergantung pada kejenuhan data di lapangan (*saturation*) (Hidir, 2002). Selanjutnya informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan.

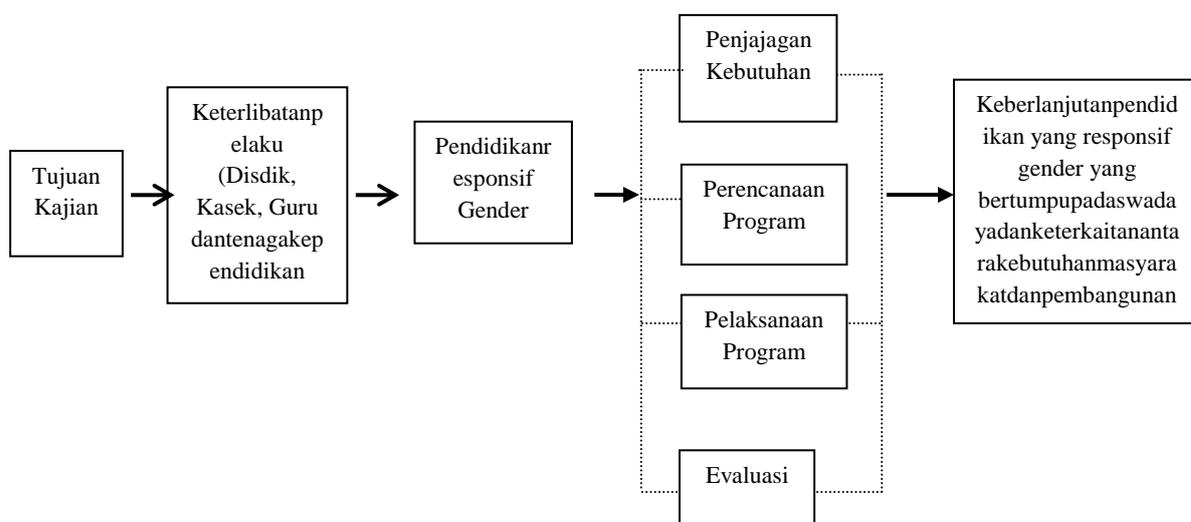
1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah sekretaris daerah dan kepala dinas pendidikan kabupaten Rokan Hilir. Dari titik ini, nantinya informan kunci nanti akan mengarahkan peneliti kepada informan utama.
2. Informa nutama di dalam penelitian inia dalah kepala sekolah yang dipilih dan yang mewakili beberapa jenjang pendidikan mulai dari SD, SLTP dan SLTA.
3. Informan tambahan dalam penelitian ini, yaitu tokoh masyarakat/pengamat bidang pendidikan, beberapa tenaga pendidik dan kependidikan yang merepresentasikan dari beberapa jenjang pendidikan yang dipilih.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini, menggunakan teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Dalam PRA metode pengumpulan data biasanya menerapkan metode:

1. Wawancara (*Indepth Interview*)
2. Pengamatan/ Observasi
3. Diskusi kelompok terarah (FGD) merupakan kelengkapan dari teknik interview (triangulasi) sebagai upaya proses check and re-check)
4. Kajian dokumen/ data
5. *Community Participation Monitoring* (CPM).

Teknik-teknik PRA ini akan sangat baik bilamana dapat diterapkan untuk mencari dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat, karena dapat diperoleh banyak informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan program serta menghindari kesalahan yang sama pada program-program sebelumnya. Langkah dan alur proses pengumpulan data serta mekanisme kerja dari PRA ini direncanakan sebagai berikut :



**Gambar 2. Alur Pengumpulan Data**

### Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Reduksi data ini meliputi : (1) meringkas data; (2) koding; (3) menelusuri tema; (4) membuat gugus atau pola data.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan dan membuang data yang tidak perlu sekaligus mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data dilakukan dengan cara: (1) seleksi ketat atas data yang terkumpul; (2) membuat ringkasan; (3) menggolongkan dengan pola yang lebih luas.

Penyajian data ini berupa sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuknya akan dibuat:

1. Teks naratif yang berbentuk catatan lapangan yang disusun dari *log book* dan

hasil wawancara dan rekaman wawancara.

2. Matrik, grafik, atau bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih dan dipahami, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya harus melakukan analisis kembali.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mencatat, merekam dan membandingkan pola-pola yang ada untuk kemudian membandingkan dengan catatan peneliti (tim peneliti lain) dan juga dengan teori serta penjelasan yang mungkin terjadi.

Kesimpulan ini awalnya dibuat secara longgar, terbuka dan tidak skeptis. Untuk kemudian secara perlahan akan diperketat dan dibuat kesimpulan umum yang lebih terinci. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara:

1. Memikir ulang selama penulisan dan mendiskusikannya dengan tim (anggota) peneliti lain.
2. Tinjauan ulang catatan lapangan

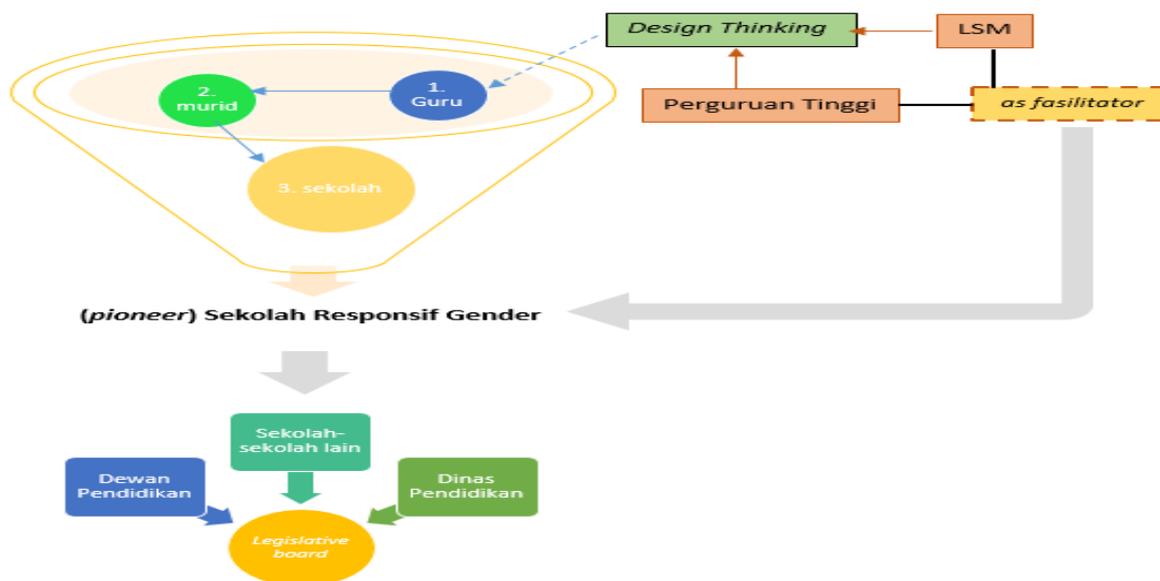
3. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat dan FGD untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep pemberdayaan masyarakat dengan alat *design thinking* mulai menjadi alternatif yang direkomendasikan untuk bidang sosial, khususnya bidang pendidikan. Adalah kemudian dikenal dengan *Toolkit Design Thinking for Educators*. Konsep ini merujuk pada tahapan proses dimana pihak pendidik (guru) telah memahami tentang *design thinking* tersebut untuk kemudian ia terapkan dalam praktik pembelajaran terhadap murid. Tentang bagaimana mempengaruhi ide-ide, kreativitas dan inovasi murid tanpa harus memaksakan murid tersebut untuk tumbuh dan berkembang yang sesuai dengan ukuran-ukuran atau standar normatif yang ditetapkan secara *rigid*. Lebih dari pada itu, *design thinking* di dunia pendidikan menghendaki proses transformasi positif yang merujuk pada tahapan proses berpikir (Batten, 1967) kelompok sasaran secara alamiah dan menghindari adanya pemaksaan nilai-nilai atau ideologi dari pihak luar dan/atau fasilitator itu sendiri. Singkat kata, *design thinking* sebagai alat pemberdayaan masyarakat mengasumsikan adanya proses *men-design thinking*-kan seluruh komponen di kelompok sasaran secara bersamaan. Akan tetapi, jika melihat hasil kajian terdahulu tentang pemetaan *existing condition* dan akar masalah terkait kesenjangan gender bidang pendidikan di Rokan Hilir, model *design thinking* dirasa

tidak bisa diaplikasikan secara *taken for granted*. Sebab dari hasil kajian tahun pertama, diketahui bahwa komitmen serta pemahaman gender dari *top executive* dan legislative Rokan Hilir masih sangat minim dan cenderung apatis serta resisten terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan. Pada saat yang sama, pemetaan dari kelompok tenaga pendidik (guru), nyatanya menunjukkan nuansa terbuka dan *welcome* terhadap hadirnya nilai-nilai gender dalam penyelenggaraan proses pendidikan di Rokan Hilir, khususnya pendidikan dasar. Merujuk pada fenomena tersebut, maka kajian tahun kedua ini secara *purposive* menetapkan guru sebagai *agent of change* dalam kerangka *design thinking*.

Prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat berbasis *design thinking* adalah menumbuhkan kemandirian dan kesadaran untuk berubah ke arah yang lebih produktif dengan meminimalisasi ketergantungan pada pihak luar terutama ketergantungan terhadap fasilitator. Dalam rangka menumbuhkan kemandirian tersebut, perlu ditumbuhkan alur yang berkesinambungan dengan menggandeng pihak-pihak lain. Dalam konteks membangun pendidikan responsif gender di Rokan Hilir, dalam kajian ini mencoba mengembangkan proses kerja yang menghubungkan atau mengaitkan berbagai pihak (*connecting the dots*), sehingga antara pihak yang satu dengan yang lain akan saling terikat pada semangat dan komitmen yang sama, yaitu keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Secara visual, proses *connecting the dots* yang dilakukan dalam kajian ini dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 3. Proses Kerja *Connecting The Dots* Menuju Pendidikan Responsif Gender di Rokan Hilir**

Kajian ini secara *purposive* menetapkan guru (Sekolah Dasar) sebagai kelompok sasaran yang hendak diberdayakan. Argumentasinya adalah, guru di Kabupaten Rokan Hilir cenderung welcome dengan keadilan dan kesetaraan gender bidnag pendidikan, sehingga dirinya dapat menularkan dan menyosialisasikan prinsip-prinsip responsivitas gender di sekolah kepada murid-muridnya melalui praktik pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Pengaruh dan rangsangan yang ditularkan oleh guru tersebut diserap oleh murid dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini secara spesifik melakukan teknik *design thinking* kepada guru kelas. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa sosok dan teladan guru kelas (wali kelas) jauh lebih mengena bagi murid dibandingkan dengan guru mata pelajaran.

Murid sekolah dasar memiliki kedekatan secara personal dengan guru wali kelasnya, sehingga tindakan dan tutur kata yang disampaikan oleh wali kelas jauh lebih mudah diserap oleh murid. Melalui praktik dan rutinitas sehari-hari yang di tunjukkan oleh guru kelas, secara tidak langsung terjadi dekonstruksi pola pikir dari murid-

murid. Bagaimana mereka melihat dan memahami nilai-nilai gender yang disampaikan oleh guru kelasnya. Misalnya, dalam praktek pemilihan ketua kelas, guru kelas mulai mengubah paradigma lama bahwa hanya murid laki-laki saja yang bisa dicalonkan menjadi ketua kelas. Pemilihan pengurus kelas sebagai representasi demokrasi di tingkat sekolah dasar membuka peluang dan kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki maupun perempuan sehingga *mainstream* bahwa ketua kelas harus laki-laki dan sekretaris kelas harus perempuan tidak lagi terjadi di tingkat sekolah dasar. Begitu juga ketika penunjukan pemimpin upacara. Jika sebelumnya harus laki-laki, maka diubah menjadi semua siswa baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pemimpin/komandan upacara, selama yang bersangkutan mampu dan mau belajar tentang prosedur protokoler dalam upacara. Itu adalah beberapa contoh nyata bagaimana guru kelas mulai membuka wawasan muridnya terkait dengan konsep dan nilai-nilai gender.

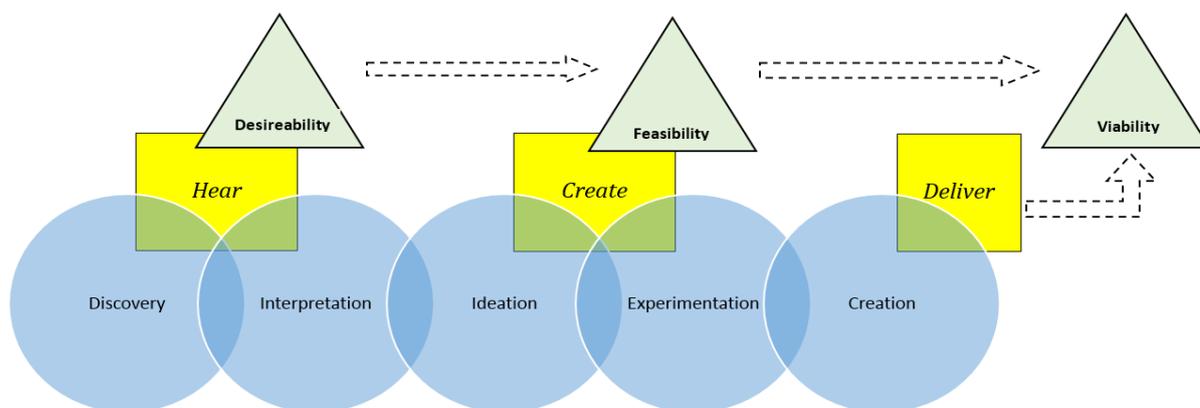
Pada tahap selanjutnya, pengaruh yang telah ditularkan guru kelas kepada

murid dari kelas I sampai dengan VI, dapat ditangkap oleh pihak sekolah sehingga secara formal, sekolah menyepakati penanaman nilai keadilan dan kesetaraan gender tersebut di sekolah. Bila secara formal telah terbangun kesepakatan di tingkat sekolah, maka dapat mulai disusun *standar operating prosedur* sekolah responsif gender. SOP ini tentu saja disesuaikan dengan aspirasi, kebutuhan serta kondisi sekolah tersebut. Oleh karena itu, peran dari peneliti perguruan tinggi sebagai fasilitator, sesungguhnya adalah dalam rangka men-*design thinking*-kan para guru kelas di sekolah dasar. Proses yang berjalan di internal sekolah dan kelas, tidak lagi melibatkan fasilitator. Bagaimana guru mengajar di kelas, berkomunikasi dengan murid, bagaimana sekolah dan guru kelas membuat kesepakatan formal tentang sekolah responsif gender, dan sebagainya, dilakukan secara independen oleh guru kelas, tentunya dengan berbekal pemahaman dan pengalaman yang *right on the track* terkait keadilan dan kesetaraan gender di sekolahnya.

Pasca terbentuknya pioneer sekolah responsif gender, dilakukan penyamaan persepsi sekaligus sosialisasi kepada sekolah-sekolah lain yang sederajat,

sehingga terbentuk jejaring sekolah responsif gender di Rokan Hilir. Jejaring sekolah responsif gender inilah yang pada gilirannya dapat melakukan *sounding* kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan serta PGRI Kabupaten Rokan Hilir. *Sounding* ini dilakukan dalam rangka memberikan trigger terhadap proses legislasi terkait kebijakan-kebijakan bidang pendidikan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Tidak dapat dipungkiri bahwa “sentilan” dari kelompok profesi seringkali cukup dipertimbangkan oleh anggota legislatif dalam proses agenda setting, formulasi maupun pengesahan kebijakan daerah. Arah dari semua proses ini adalah terwujudnya pendidikan responsif gender yang menjadikan guru kelas sebagai *gender focal point*.

Dalam perannya sebagai *gender focal point* di sekolah, guru kelas yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan *treatment* dalam rangka melakukan *design thinking* terkait pemahaman dan komitmen mereka dalam rangka menjadikan sekolahnya responsif gender. Beberapa langkah dan tahapan yang dikenakan terhadap guru kelas adalah sebagai berikut.



**Gambar 4. Proses *Design Thinking* terhadap Guru Kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Rokan Hilir**

Proses *design thinking* yang tergambar dalam Gambar 4 dilakukan

peneliti dalam kegiatan FGD dengan guru kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Rokan

Hilir. FGD dilakukan terhadap 10 (sepuluh) orang guru kelas yang dilakukan secara acak. Hasil FGD dengan para guru selanjutnya ditriangulasikan dengan triangulasi sumber dalam rangka menguji keabsahan data dan temuan yang diperoleh di lapangan. Dari proses FGD yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa pembelajaran sebagai berikut.

1. Sebelum dilakukan FGD dengan guru kelas, dilakukan langkah *discovery* dan *interpretation* dalam rangka memahami situasi dan kondisi kelompok sasaran/informan. *Discovery* merupakan langkah pendekatan kepada guru kelas secara formal maupun nonformal, sedangkan *interpretation* adalah langkah untuk mempelajari dan melakukan penafsiran sekaligus pemetaan individu-individu guru kelas yang mana saja yang dapat ditetapkan menjadi unit analisis dan informan penelitian. Dalam melakukan *discovery* dan *interpretation* ini, peneliti memposisikan diri sebagai pendengar yang baik bagi guru-guru tersebut. Di sinilah diaplikasikan teknik "*hearing*" dalam rangka mendekati, mempelajari, memahami dan menafsirkan aspirasi, kebutuhan dan sudut pandang guru kelas terkait dengan integrasi gender di sekolah.
2. Selanjutnya dilakukan *ideation* yaitu penciptaan peluang terhadap integrasi nilai gender di sekolah/kelas serta *experimentation* yaitu langkah membangun ide-ide kontekstual dari para guru kelas. Langkah *ideation* dan *experimentation* dikembangkan dalam serangkaian proses FGD yang mana telah ditetapkan sepuluh orang guru kelas sebagai informannya. Berbagai informasi yang terjaring pada langkah *discovery* dan *interpretation* digali lebih dalam lagi pada langkah ini. Setidaknya dibutuhkan sekitar lima kali FGD yang intens hingga dapat benar-benar menciptakan peluang serta

mengembangkan ide-ide integrasi gender di bangku sekolah dasar.

3. Langkah terakhir yang dilakukan adalah *creation*, yaitu proses pengembangan ide-ide integrasi gender dalam proses pembelajaran sehari-hari kepada murid. Langkah ini masih sedang berlangsung hingga sekarang.

Terhadap kelima langkah yang dilakukan (*discovery – interpretation – ideation – experimentation – creation*) dalam kajian pemberdayaan ini, mengerucut pada beberapa pokok permasalahan dalam integrasi gender di bangku sekolah dasar.

#### 1. *Desireability*

*Desireability* merujuk pada identifikasi terkait apa-apa saja yang dimau dan diharapkan oleh para guru kelas terkait dengan proses pembelajaran dan kondisi sekolahnya. Pada umumnya, guru kelas yang diwawancarai mengatakan masih minimnya upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan mereka, terutama terkait dengan perencanaan pembelajaran dan manajemen sekolah. Terjadi perbedaan antara guru yang honorer dengan yang sudah PNS. Artinya lebih banyak prioritas kepada guru PNS, sementara secara faktual justru lebih banyak guru honorer yang aktif dan berkecimpung langsung dengan para murid. Dari aspek gender, ketimpangan terjadi manakala manajemen sekolah yang efektif dan efisien dinilai lebih berpeluang terwujud jika dimanajeri oleh laki-laki. Image bahwa guru merupakan sosok yang ramah, santun, halus tutur kata dan penyayang, seolah langsung dikaitkan dengan sosok perempuan, sehingga guru perempuanlah yang dipandang memang lebih pantas terjun/ berhadapan langsung dengan para murid, sementara untuk urusan pelatihan, pendidikan dan pengembangan *soft skill* ataupun *hard skill*, guru laki-laki

dipandang lebih layak karena dinilai lebih gesit dari segi fisik maupun non-fisik (ketersediaan waktu, dan sebagainya). Kondisi inilah yang kemudian membuat guru kelas (perempuan) seolah menjadi “katak dalam tempurung” yang berkuat dengan rutinitas mengajar yang penuh dengan ukuran dan standar-standar normatif, padahal di luar sana telah terjadi perkembangan dan dinamika yang pesat terkait perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran itu sendiri. Guru-guru ini hanya mengaplikasikan apa yang selama ini mereka peroleh ketika mereka bersekolah, sedangkan hal-hal yang kekinian yang positif yang bisa mereka kembangkan di kelas masih minim mereka salurkan kepada murid karena ketidaktahuan mereka tentang bagaimana proses pengembangan pembelajaran yang kreatif sekaligus menginspirasi.

## 2. Feasibility

Pada aspek ini, diidentifikasi pertimbangan-pertimbangan teknis dan organisasional yang mendukung integrasi gender dalam kehidupan sekolah dasar. Secara teknis, memang belum ada regulasi ataupun juklak/juknis yang mengatur tentang bagaimana gender dapat disosialisasikan dalam kehidupan sekolah. Jangankan untuk mengatur integrasi gender di sekolah, regulasi yang mengintegrasikan gender dalam bidang pendidikan pada umumnya saja belum terbangun di Kabupaten Rokan Hilir. Adanya kekosongan dari segi teknis, regulasi maupun organisasi ini membuat integrasi gender di sekolah memang harus dilakukan secara *bottom up* dan hal ini hanya bisa dilakukan dengan memberdayakan para pionir-pionir gender dari kalangan guru kelas. Meskipun pada awal pengumpulan data belum ditemukan sosok guru yang dapat menjadi pionir, akan tetapi peneliti melihat adanya beberapa guru yang telah memiliki modal dasar untuk menjadi pionir gender di tingkat sekolah dasar. Modal

dasar tersebut terlihat dari bagaimana potensi dan prestasi yang mereka capai di tingkat kabupaten serta bagaimana keterbukaan mereka terhadap ide-ide atau hal baru yang konstruktif untuk diri dan murid-muridnya.

## 3. Viability

*Viability* terkait dengan dukungan financial untuk mengintegrasikan gender di lingkungan sekolah. Jika kita membicarakan pada level satu sekolah dasar, integrasi gender melalui *design thinking* relatif tidak berbiaya besar, sebab yang disasar adalah tentang pola pikir guru kelas. Pendekatan yang dilakukan adalah terkait tahapan proses berpikir guru tersebut. Bagaimana mengubah pola pikir guru kelas tentang gender lebih membutuhkan kecakapan dan kemahiran berkomunikasi dari peneliti. Hal ini berbeda ketika kita membicarakan bagaimana menciptakan perubahan yang besar-besaran untuk pendidikan di Rokan Hilir. Jelas membutuhkan dukungan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, pada level pemberdayaan berbasis *design thinking* di sekolah, dukungan financial yang diperlukan dapat diupayakan secara swadaya oleh pihak sekolah ataupun pihak guru itu sendiri. Akan tetapi jika hendak menularkan dan menyosialisasikan pentingnya pengembangan sekolah yang responsif gender, *budgeting support* dari pemerintah dan legislatif mutlak dibutuhkan, sebab perubahan yang dikehendaki sifatnya makro.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Memasukkan perspektif gender dalam kebijakan pendidikan di sekolah bukanlah pekerjaan mudah, karena berbenturan dengan berbagai kepentingan, nilai maupun keyakinan seseorang / sekelompok ‘orang yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan. Secara garis besar ada 4 faktor yang

memberi kontribusi cukup kuat terhadap terintegrasinya perspektif gender dalam pendidikan di sekolah.

*Pertama*, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan pendidikan di sekolah, SDM tersebut tidak bekerja dalam ruang yang vakum, tetapi berinteraksi secara terus-menerus dengan faktor-faktor di luar dirinya, sehingga membentuk keyakinan tentang penting tidaknya memasukkan gender sebagai arus utama pada kebijakan pendidikan. SDM yang paham tentang gender, memiliki sensitivitas gender dan memiliki otoritas terkait dengan pembangunan pendidikan di sekolah dengan memberi kontribusi sangat kuat terhadap terintegrasinya kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan pendidikan di sekolah.

*Kedua*, *Capacity building* dan advokasi pengarusutamaan gender di bidang pendidikan di sekolah, baik terhadap *stakeholders* pada tingkat internal maupun eksternal Dinas Pendidikan yang dilakukan secara berjenjang dari top eksekutif hingga pelaksana di tingkat *grass root*.

*Ketiga*, budaya organisasi yang mengedepankan visi dan misi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Terbangunnya budaya organisasi atas dasar hubungan gender yang egaliter dapat digunakan sebagai pedoman bersikap, bertindak atau berperilaku antar antar anggota organisasi dalam mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses formulasi kebijakan pendidikan di sekolah.

*Keempat*, pembentukan dan penguatan jejaring dan kemitraan akan mampu membangun proses pembelajaran bersama antar *stakeholders* dan jejaringnya sehingga menumbuhkan sensitivitas gender yang akan akan memberi kontribusi terhadap masuknya perspektif gender pada kebijakan pendidikan di sekolah.

Sekolah merupakan lembaga yang berperan penting untuk merubah pola pikir peserta didik termasuk perilaku-perilaku yang dianggap bias gender. Oleh karena itu, sekolah adil gender memegang peran dan fungsi yang strategis dalam mempersiapkan peserta didik agar dapat mengembangkan multi intelegensianya secara optimal tanpa terkendala oleh nilai-nilai sosial budaya yang kadang bias gender. Sekolah berwawasan gender adalah suatu sekolah yang baik aspek akademik, sosial, aspek lingkungan fisiknya maupun lingkungan masyarakatnya memperhatikan secara seimbang baik kebutuhan spesifik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Dengan demikian guru, orang tua, tokoh, anggota masyarakat di sekitarnya serta siswa laki-laki dan perempuan menyadari akan pentingnya dan oleh karena itu mempraktekkan tindakan-tindakan yang setara dan adil gender.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2009. *Community Development Perusahaan Migas; Model Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Bandung : UNPAD Press
- Batten, T.R. 1967. *Non Directive Approach in Group and Community Work*. Oxford : Oxford University Press.
- Brown, Tim. Wyatt, Jocelyn. 2010. *Design Thinking for Social Innovation*. Stanford Social Innovation Review: Stanford School of Business, pp.29-35.
- Glen, Andrew. 1993. *Methods and Themes in Community Practice*. In: Butcher, H. et al (eds). *Community and Public Policy*. London : Pluto.
- Glinski, P. 2012. *Design Thinking And The Facilitation Process*. Collaborative Design Workshop. NSW, Australia.
- Hidir, Achmad. 2002. *Metode Etnografi: Sebuah Varian Kualitatif*.

- Pusbangdik Universitas Riau (diterbitkan terbatas).
- IDEO team, IDE, Heifer international and ICRW (funded by Bill and Melinda Gates Foundation) *Human Centered Design (HCD) Toolkit: Design Thinking Toolkit for Social Innovation Project 2<sup>nd</sup>.ed.*. Licensed under The Creative Commons Attribution, Non Commercial, Share A-Like 3.0 Unported License.
- Kartasasmita. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lippit, Ronald, Jeanne Watson dan Bruce Westley. 1958. *The Dynamics of Planned Change*. New York: Harcourt, Brace & World. Inc.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Source Of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Purnomo, Dwi. 2015. *Konsep Design Thinking Bagi Pengembangan Rencana Program Dan Pembelajaran Kreatif Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Makalah Dalam *Konferensi Nasional "Inovasi dan Technopreneurship"*, 18-19 Februari 2013.
- Rinawati, Rini. 2009. *Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : UNPAD Press.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana : Jogjakarta.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Wibowo, Dwi Edi. 2010. *Sekolah Berwawasan Gender*. Jurnal Muwazah Vol.2 No.1 Juli 2010
- Wrihatnolo, Randy & Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan; Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.